

Tax Avoidance Memediasi Pengambilalihan Aset dan Struktur Kepemilikan Perusahaan

Verina Purnamasari^{1*}, Dian Essa Nugrahini², Ahmad Hijri Alfian³

^{1,2,3} Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

*)Corresponding Author, email: verinapurnamasari@unissula.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 03/08/2023

Revised: 04/11/2023

Accepted: 08/01/2024

Keywords:

managerial ownership, institutional ownership, public ownership, tax avoidance, tunneling, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, tax avoidance, tunneling.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.30659/jai.13.1.1-16>

ABSTRACT

This study aims to analyze and obtain empirical evidence of tax avoidance mediating asset acquisition and company ownership. The sample in this study uses secondary data from company annual reports on the Islamic stock index, namely companies that are consistently listed on the Jakarta Islamic Index (JII) in 2021-2022. This study used a purposive sampling method which produced a total of 48 data. The research hypothesis was tested using the Ordinary Least Squares Regression method with the Eviews 12 application. The results showed that institutional ownership (KI) and managerial ownership (KM) had no effect on tax avoidance (TA). Meanwhile, public ownership (KP) has a significant negative effect on TA. KI has no significant effect on tunneling, while KM, KP and TA have a significant negative effect on tunneling. TA does not mediate the effect of KI, KM, and KP on tunneling.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris *tax avoidance* memediasi pengambilalihan aset (*tunneling*) dan kepemilikan perusahaan. Sampel pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan pada indeks saham syariah yaitu perusahaan yang secara konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan data sejumlah 48 data. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode *Regresi Ordinary Least Squares* dengan aplikasi Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (KI) dan kepemilikan manajerial (KM) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (TA). Sedangkan kepemilikan publik (KP) berpengaruh negatif signifikan terhadap TA. KI tidak berpengaruh signifikan terhadap *tunneling*, sedangkan KM, KP dan TA berpengaruh negatif signifikan terhadap *tunneling*. TA tidak menjadi mediasi pengaruh KI, KM, dan KP terhadap *tunneling*.



Jurnal Akuntansi Indonesia | Copyright (c) 2024 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

1. PENDAHULUAN

Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan adalah penyebab utama lemahnya *corporate governance* (Sari & Sugiharto, 2018). Fenomena *corporate governance* yang paling banyak terjadi di Indonesia terkait struktur kepemilikan saham adalah tunneling. Tunneling sangat melanggar kepentingan investor, sehingga penelitian fokus bagaimana mengurangi terjadinya tunneling dan melindungi kepentingan investor (Ye et al., 2015).

Jenis *tunneling* yang paling umum digunakan adalah melalui pinjaman antar perusahaan di mana pemegang saham pengendali mengalihkan sumber daya dari perusahaan lain yang juga di bawah kendali mereka (Y. Liu et al., 2014). Aksi tunneling yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerugian berbagai pihak. Menurut penelitian Lam et al. (2012), Tang (2016), Selcuk & Sene (2018) dan Hassan et al., (2022) tunneling dapat menyebabkan kerugian bagi entitas, *shareholders*, dan negara.

Menurut Wiranata & Nugrahanti (2013) terdapat kondisi yang menyebabkan konflik kepemilikan perusahaan di Indonesia, yaitu: heterogenitas muncul dengan pemegang saham di bawah kepemilikan terkonsentrasi dan keuntungan pemegang saham besar dengan kontrol yang relatif kuat atas perusahaan tidak sama dengan pemegang saham besar menengah dan kecil. Dalam keadaan seperti itu, pemegang saham besar dapat mengambil alih keuntungan pemegang saham menengah dan kecil dengan cara berkolusi antara orang dalam dengan informasi dan keuntungan pengendalian mereka.

Kasus tunneling masif di Indonesia dilakukan oleh manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang selanjutnya disebut SULI pada tahun 2011. Diketahui 60% saham SULI dijual dengan harga yang jauh dibawah nilai wajar ke PT Tjiwi Kimia. Kasus lainnya terjadi pada Bank Century Tbk. oleh Robert Tantular sebagai pemegang saham mayoritas. Robert membuat Bank Century memberikan pendanaan atau pinjaman pada dua perusahaan miliknya tanpa prosedur analisis yang memadai.

Struktur kepemilikan dipicu oleh POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan pasal 9 ayat 1 dan pasal 18 ayat 4, menjadi salah satu hal yang memicu adanya tunneling. Tang (2016) menyebutkan bahwa tunneling dapat menjadi salah satu insentif penghindaran pajak yang memberikan pemahaman baru bagi perusahaan mengapa melakukan penghindaran pajak. Skema penghindaran pajak memiliki tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Pada batas tertentu, penghindaran pajak bersifat sah dan tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun.

Dunia IT dan perekonomian semakin berkembang sehingga menyebabkan perencanaan pajak yang agresif mengarah pada pergeseran pendapatan atau pengeluaran akuntansi dari waktu ke waktu dan/atau pada entitas bisnis yang berbeda. Ini menyiratkan perubahan dalam fungsi akuntansi. Selain itu, untuk memungkinkan penerapan strategi penghindaran pajak, manajer dapat membangun struktur operasi yang terlalu kompleks daripada yang diharapkan untuk aktivitas ekonomi tertentu (Baker et al., 2023).

Baik penelitian teoritis maupun empiris yang menguji bagaimana struktur kepemilikan berpengaruh terhadap tunneling tidak memberikan bukti, namun hasilnya justru ambigu. Penelitian yang menunjukkan pengaruh positif struktur kepemilikan terhadap perilaku tunneling yaitu Tang (2016), Jiang et al. (2010), serta Aharony et al. (2010). Efek negatif ditemukan oleh Fakhriyyah et al. (2017), Chen et al. (2008), (Fan et al., 2007), serta Q. Liu & Lu, (2007).

Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tunneling* yang dimediasi oleh *tax avoidance*. Struktur kepemilikan menggunakan tolak ukur kepemilikan institusional, manajerial (direksi), dan publik. Menurut Gao & Kling, (2008) menunjukkan bahwa pemegang saham institusional cenderung mentransfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk mempertahankan operasi perusahaan induk. Penelitian yang dilakukan oleh Shan (2013), Huyghebaert & Wang (2012), Imam et al. (2016), Cheung et al. (2006), C. Chen et al. (2018), menemukan bahwa struktur kepemilikan institusional memiliki efek negatif pada risiko pengambilalihan atau perilaku tunneling. Sedangkan penelitian Huang

(2019) menunjuk bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap risiko pengambilalihan.

Kepemilikan manajerial telah dilihat sebagai faktor yang bisa menyelaraskan perbedaan potensial kepentingan manajemen dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Namun, beberapa penelitian mengatakan sebaliknya. Apabila kepemilikan manajemen meningkat tidak selalu mampu meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham secara keseluruhan. Bahkan disebutkan jika manajer di sebuah perusahaan meningkatkan kepemilikannya maka hal yang dapat terjadi adalah para manajer mendominasi jajaran direksi sehingga dapat dengan mudah mengambil keputusan, dengan demikian manajer mengisolasi kepentingan pihak lain dalam pengendalian internal dan eksternal perusahaan (Gibson, 2003; Juliarto et al., 2013; Santiago-Castro & Brown, 2011).

Penelitian Xie et al. (2012) menyimpulkan bahwa kepemilikan publik memiliki efek negatif pada risiko pengambilalihan. Sari & Sugiharto (2018) menyatakan bahwa kepemilikan publik memiliki dampak positif pada risiko tunneling.

Meninjau studi empiris tentang interaksi antara *tax avoidance* dan struktur kepemilikan terhadap perilaku *tunneling*. Penelitian yang menunjukkan pengaruh positif yaitu Desai & Dharmapala (2009), Kim et al. (2011) serta S. Chen et al. (2010) mereka menunjukkan bahwa kegiatan *tax avoidance* dapat memfasilitasi pemegang saham mayoritas untuk mengalihkan sumber daya dari pemegang saham minoritas. Melihat fenomena yang ada maka penelitian ini menambah variabel mediasi *tax avoidance* karena terdapat indikasi bahwa perilaku *tunneling* dapat terjadi melalui struktur kepemilikan perusahaan yang dapat memanipulasi pajak sebagai alat untuk kecurangan pemegang saham pengendali, sehingga dapat meminimalkan kerugian yang dialami oleh pemegang saham mayoritas dan meminimalkan kerugian negara atas penerimaan pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agensi

Sifat dari struktur kepemilikan perusahaan akan mempengaruhi jenis masalah keagenan yang dihadapi. Teori dari Jensen & Meckling (1976) menyebutkan apabila kepemilikan saham terdistribusi dengan luas, masalah keagenan yang kemungkinan besar dapat terjadi yaitu pertentangan antara pemegang saham (sebagai principal) dan manager (sebagai agen). Konflik timbul karena adanya asimetri informasi yang menyebabkan manajer (direksi) memiliki informasi yang lebih banyak daripada pemegang saham. Pada perusahaan yang kepemilikannya tidak terdistribusi luas atau terkonsentrasi, dalam artian satu pihak memiliki pengendalian atas perusahaan, maka masalah keagenan yang timbul akan berbeda, yaitu dimana masalah manager dengan pemegang saham berubah menjadi pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali (Claessens et al., 2002). Adanya konflik pemegang saham pengendali dan non-pengendali menyebabkan timbulnya peluang untuk mengeksploitasi hak dari pemegang saham non-pengendali melalui *tunneling*.

Johnson et al., (2000) mendefinisikan *tunneling* sebagai arus keluar sumber daya perusahaan ke pemegang saham pengendali. Pemandahan sumber daya perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan mentransfer sumber daya dari perusahaan ke dirinya dengan cara melakukan transaksi antara perusahaan dan pemegang saham mayoritas dan meningkatkan kepemilikan pemilik saham mayoritas atas perusahaan dengan menerbitkan saham atau dengan transaksi lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas.

2.2. Pengambilalihan Aset (*Tunneling*)

Sejarah *tunneling* awalnya adalah tindakan pengambilan aset suatu pemegang saham

minoritas di Republik Cekodemi keuntungan demi kepentingan pemegang saham mayoritas (Guing & Farahmita, 2011). *Tunneling* merupakan tindakan manajemen atau shareholder mayoritas yang mentransfer aset dan keuntungan entitas untuk kepentingan individu, tetapi biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009). Jenis *tunneling* yang paling umum digunakan adalah melalui pinjaman antar perusahaan di mana pemegang saham pengendali mengalihkan sumber daya dari perusahaan lain yang juga di bawah kendali mereka (Y. Liu et al., 2014). Mengikuti penelitian sebelumnya dalam literatur (Jiang et al., 2010; Q. Liu et al., 2015; Y. Liu et al., 2014), penelitian ini mengadopsi variabel ORECTA (Other Receivable to Total Assets), yang dihitung dengan membagi piutang lain-lain dengan total aset, untuk mengukur sejauhmana *tunneling* dikendalikan pemegang saham.

2.3. Tax Avoidance (TA)

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* (TA) diterjemahkan sebagai sesuatu yang mengurangi tarif pajak efektif tunai perusahaan selama periode waktu yang lama. Dengan demikian, akan mencerminkan pengurangan pajak yang sepenuhnya sesuai dengan hukum dan juga yang dihasilkan dari interpretasi wilayah abu-abu (Dyreng et al., 2008). Pohan (2013) menyebutkan bahwa TA merupakan strategi perencanaan pajak perusahaan yang ditetapkan oleh manajer sebagai kegiatan untuk menghindari pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam jangka panjang. Terutama dilakukan dengan mempertahankan tarif pajak efektif yang lebih rendah, serta perbedaan yang lebih besar antara pendapatan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak dalam jangka panjang (Saragih & Ali, 2023).

2.4. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan sebagian besar perusahaan terbuka di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia sangat terkonsentrasi, dan sebagian besar perusahaan terbuka memiliki struktur kepemilikan piramida yang mengakibatkan perbedaan antara kontrol arus kas. Perusahaan seperti ini memilih untuk mempraktikkan mekanisme tata kelola perusahaan yang lemah untuk memungkinkan pemegang saham pengendali mengambil alih asset perusahaan (Utama et al., 2017). Berikut adalah pengkategorian struktur kepemilikan perusahaan:

2.5. Kepemilikan Institusional (KI) dan Tax Avoidance (TA)

Kepemilikan institusional dapat berpengaruh pada TA, karena pemegang saham institusi memiliki intensi yang lebih kuat untuk mengawasi kinerja perusahaan karena kebijakan kepemilikan mereka lebih besar. Pemilik institusional disarankan untuk lebih akurat dalam memantau aktivitas perencanaan pajak karena apabila terjadi kelalaian pemantauan akan dapat mengakibatkan perilaku oportunistik manajer (Kholbadalov, 2012). Kepemilikan institusional yang aktif dan cangguh memiliki insentif keuangan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan sehingga kepemilikan institusional dapat mengendalikan manajer secara profesional. Kepemilikan institusional menjadi penghalang para manajer dalam mentransfer sumber daya yang diperoleh melalui pengelolaan pajak. Investor institusional yang memegang sejumlah besar saham memiliki kewajiban untuk memastikan keberlanjutan pemegang saham dalam jangka panjang, investor institusional dapat menyebarkan perannya ke seluruh organisasi. Khurana & Moser (2012) menemukan kepemilikan institusional dapat berfungsi sebagai mekanisme alternative corporate governance. Penelitian Ying et al., (2017) menyebutkan pemegang saham institusional dapat memberikan pengaruh atas keputusan besar perusahaan, misalnya perencanaan pajak perusahaan.

H1a: Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (TA).

2.6. Kepemilikan Manajerial (KM) dan *Tax Avoidance* (TA)

Manajer menerapkan berbagai strategi penting dan membuat keputusan strategis, termasuk strategi dan keputusan perencanaan pajak perusahaan (S. X. Chen, 2017; Koester et al., 2017; Lee & Yoon, 2020). Pajak merupakan salah satu pengeluaran paling signifikan bagi sebagian besar perusahaan (Kovermann, 2018), manajer dengan kemampuan manajerialnya harus mengelolanya secara optimal dengan menetapkan strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaannya. Kemampuan manajerial mengacu pada kemampuan manajer untuk secara efisien mengelola sumber daya perusahaan (Demerjian et al., 2012). Ini merupakan salah satu atribut penting tata kelola perusahaan, yang akan mendorong sejauh mana manajer akan mengubah sumber daya perusahaan menjadi pendapatan dengan cara yang seefisien mungkin. Dalam hal ini, kehadiran manajer yang lebih cakap memungkinkan tingkat strategi pajak tertentu yang tidak selalu mengarahkan perusahaan untuk meningkatkan risiko pajak mereka. Dalam lingkungan yang sangat dinamis, semakin besar kepemilikan manajerial maka manajer harus cerdas dan efisien dalam melakukan strategi perencanaan pajak untuk secara bersamaan mengurangi beban pajak dan risiko pajak, karena keduanya hidup berdampingan (Lin et al., 2019).

H1b: Kepemilikan Manajerial (KM) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (TA).

2.7. Kepemilikan Publik (KP) dan *Tax Avoidance* (TA)

Struktur kepemilikan publik perusahaan merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan, dan memiliki dampak yang besar terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan (Alkurdi & Mardini, 2020; Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan publik dapat didefinisikan sebagai proporsi kepemilikan perusahaan yang dipegang oleh pemegang saham umum. Seperti investor institusional, pemegang saham umum atau publik juga berkeinginan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan negara dalam bentuk pembayaran pajak. Kepemilikan publik lebih menghindari penghindaran pajak yang berlebihan karena meningkatkan biaya reputasi perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada harga saham (Hassan et al., 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemegang saham publik akan menguatkan strategi perencanaan pajak selama biaya dari strategi tersebut tidak merugikannya. Kepemilikan publik mendorong pihak manajemen memiliki ruang gerak yang sempit sehingga kesalahan yang mungkin dilakukan pihak manajemen sangat kecil.

H1c: Kepemilikan Publik (KP) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (TA).

2.8. Kepemilikan Institusional (KI) dan Pengambilalihan Aset (*Tunneling*)

Kepemilikan institusional sebagai pengawas memiliki peran dalam membatasi penghindaran pajak sebuah praktik yang merangsang pengambilalihan mayoritas dalam pengaturan kepemilikan yang terkonsentrasi (Athira & Lukose, 2023). Hal ini memungkinkan bagi investor institusional untuk mengintervensi dan mengurangi agresivitas pajak, yang memfasilitasi pengambilalihan (*tunneling*) kekayaan oleh pemegang saham mayoritas. Semakin tinggi KI dapat mengurangi resiko pengambilalihan karena pemantauan kelembagaan semakin meningkat. KI juga mengoptimalkan pengawasan pada manajemen untuk menurunkan agency conflict. Studi empiris yang menunjukkan pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap *tunneling* antara lain Selcuk & Sene (2018), Shan (2013), Lam et al. (2012), Imam et al. (2016), Cheung et al. (2006), dan J. Chen et al. (2008).

H2a : Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh negatif terhadap *Tunneling*.

2.9. Kepemilikan Manajerial (KM) dan Pengambilalihan Aset (*Tunneling*)

Perilaku *tunneling* merupakan opportunistic behavior yang merupakan pemikiran

untuk memakai peluang kesempatan sebaik mungkin untuk menguntungkan diri sendiri atau oknum tertentu. Manajer mengetahui bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang negatif, jadi manajer tidak mungkin melakukan sesuatu yang mengakibatkan dampak negatif untuk jangka panjang, karena manajer sebagai pemegang saham apabila melakukan *tunneling* meskipun menguntungkan pada jangka pendek perilaku tersebut akan merugikannya pada jangka panjang. Jadi apabila kepemilikan manajerial semakin tinggi maka *tunneling* semakin rendah. Studi empiris yang menunjukkan pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap *tunneling* antara lain Gao & Kling (2008) dan Q. Liu & Lu (2007).

H2b : Kepemilikan Manajerial (KM) berpengaruh negatif terhadap *Tunneling*.

2.10. Kepemilikan Publik (KP) dan Pengambilalihan Aset (*Tunneling*)

Kepemilikan publik dapat mengurangi tingkat risiko pengambilalihan karena kepemilikan publik dapat bertindak sebagai pemantauan. Imam et al. (2016) menyebutkan kepemilikan publik semakin besar kemungkinan *tunneling* semakin kecil karena banyak stakeholder mengamati perilaku manajemen, dibandingkan apabila kepemilikan dominan dimiliki oleh individu, maka kemungkinan dapat terjadi *tunneling* yang semakin besar. Kaitannya dengan perilaku oportunistik jika kepemilikan publik semakin besar penelitian terdahulu menunjukkan perilaku earnings management menjadi lebih kecil. Earnings management menunjukkan perilaku oportunistik yang hampir sama dengan *tunneling*. Studi empiris yang menunjukkan pengaruh negatif kepemilikan publik terhadap *tunneling* antara lain Imam et al. (2016) dan Xie et al. (2012).

H2c : Kepemilikan Publik (KP) berpengaruh negatif terhadap *Tunneling*.

2.11. Tax Avoidance (TA) dan Pengambilalihan Aset (*Tunneling*)

Struktur kepemilikan yang lemah lebih rentan terhadap masalah keagenan misalnya *tunneling* yang dapat diperkuat melalui penghindaran pajak sehingga diperlukan kebijakan yang jelas oleh pihak manajemen dalam proses penghindaran pajak. Penelitian Tang (2016) menyebutkan bahwa interaksi penghindaran pajak dan *tunneling* yang ada di perusahaan milik pemerintah tidak dapat terpecahkan karena terdapat hubungan jika penghindaran pajak untuk memfasilitasi *tunneling*. Perusahaan yang dikelola dengan buruk lebih cenderung menggunakan penghindaran pajak untuk memfasilitasi *tunneling* (Desai & Dharmapala, 2009).

H3 : *Tax Avoidance* (TA) berpengaruh positif terhadap Pengambilalihan Aset (*Tunneling*).

2.12. Tax Avoidance (TA) Memediasi Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) terhadap Pengambilalihan Aset (*Tunneling*)

Kepemilikan institusi salah satu cara yang dapat dipergunakan dalam menurunkan agency conflict. Artinya semakin besar tingkat kepemilikan institusi maka semakin tinggi tingkat pengendalian yang dijalankan oleh pihak luar terhadap entitas sehingga dapat mengurangi perilaku *tunneling* melalui *tax avoidance*. Oleh karena itu semakin tinggi kepemilikan institusional dapat menurunkan *tax avoidance* sehingga kemungkinan *tunneling* semakin kecil. Penelitian yang mendukung hubungan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Kholbadalov (2012), Annisa & Kurniasih (2012) dan Fiandri & Muid (2017). Sedangkan penelitian Selcuk & Sene (2018), Shan (2013), Lam et al. (2012), Imam et al. (2016), Cheung et al. (2006), J. Chen et al. (2008) mendukung bukti bahwa ada dampak kepemilikan institusional terhadap *tunneling*. Menurut argument yang disebutkan peneliti menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat berfungsi sebagai mediator yang mempengaruhi kepemilikan institusional pada *tunneling*.

H4a: *Tax Avoidance* (TA) menjadi mediasi pengaruh Kepemilikan Institusi (KI) terhadap Pengambialihan Aset (*Tunneling*).

2.13. *Tax Avoidance* (TA) Memediasi Pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Pengambialihan Aset (*Tunneling*)

Konflik keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) dapat muncul ketika kepemilikan manajerial sebagai pemegang saham mayoritas mengambil alih keuntungan perusahaan dan merugikan pemegang saham lainnya, sehingga tidak memenuhi ekspektasi pemegang saham lainnya. Meski pihak manajemen mengetahui celah untuk mengambil alih keuntungan perusahaan melalui *tax avoidance* sebagai sarana dalam memfasilitasi *tunneling*, akan tetapi tindakan tersebut tidak diambil oleh manajemen karena hal tersebut dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang, sehingga manajer sebagai pemilik saham tidak mau apabila kondisi perusahaannya itu terancam. Penelitian yang mendukung hubungan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* didukung oleh penelitian terdahulu yaitu McGuire et al. (2011). Sedangkan penelitian Gao & Kling (2008), Q. Liu & Lu (2007) mendukung bukti bahwa ada dampak kepemilikan manajerial terhadap *tunneling*. Penelitian ini menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel kepemilikan manajerial pada *tunneling* melalui *tax avoidance* sehingga *tax avoidance* sebagai pengaruh mediasi diperlukan dalam menjelaskan pengaruh kepemilikan manajerial pada *tunneling*.

H4b: *Tax Avoidance* (TA) menjadi mediasi pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Pengambialihan Aset (*Tunneling*).

2.14. *Tax Avoidance* (TA) Memediasi Pengaruh Kepemilikan Publik (KP) terhadap Pengambialihan Aset (*Tunneling*)

Menurut teori keagenan Jensen & Meckling (1976), kepemilikan publik memiliki efek negatif pada risiko pengambialihan karena tingkat pemantauan yang tinggi dari investor publik dapat menurunkan kesempatan bagi transaksi pengambialihan atau *tunneling* melalui *tax avoidance*. Oleh karena itu semakin tinggi kepemilikan publik dapat menurunkan *tax avoidance* sehingga kemungkinan *tunneling* semakin kecil. Penelitian yang mendukung hubungan kepemilikan publik terhadap *tax avoidance* didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Silvia dan Puji (2014). Sedangkan penelitian Imam et al. (2016) dan Xie et al. (2012) mendukung bukti bahwa ada dampak kepemilikan publik terhadap *tunneling*. Penelitian ini menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel kepemilikan publik pada *tunneling* melalui *tax avoidance* sehingga *tax avoidance* sebagai pengaruh mediasi diperlukan dalam menjelaskan pengaruh kepemilikan publik pada *tunneling*.

H4c: *Tax avoidance* (TA) menjadi mediasi pengaruh Kepemilikan Publik (KP) terhadap Pengambialihan Aset (*Tunneling*).

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan data sekunder berupa metode kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan bantuan program Eviews 12. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang secara konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2021-2022. Jumlah sampelnya ada 48 perusahaan. Alasan penggunaan populasinya yang hanya merupakan perusahaan yang terdaftar pada indeks saham syariah yaitu Jakarta Islamic Index (JII) agar dapat diketahui bagaimana pengambialihan aset (*tunneling*) sebagai variabel dependen dapat dipengaruhi struktur kepemilikan dan dimediasi dengan *tax avoidance* pada perusahaan yang berindeks syariah. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.

3.1 Tunneling

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Jenis *tunneling* yang paling umum digunakan adalah melalui pinjaman antar perusahaan di mana pemegang saham pengendali mengalihkan sumber daya dari perusahaan lain yang juga di bawah kendali mereka (Y. Liu et al., 2014). Mengikuti penelitian sebelumnya dalam literatur Qigui Liu et al. (2015), Y. Liu et al. (2014), Jiang et al. (2010), penelitian ini mengadopsi variabel ORECTA (Other Receivable to Total Assets), yang dihitung dengan membagi piutang lain-lain dengan total aset, untuk mengukur sejauhmana *tunneling* dikendalikan pemegang saham. Rumus untuk menghitung *tunneling* adalah sebagai berikut :

$$Tunneling = \frac{\text{Jumlah total "Piutang lain-lain"}}{\text{Total Aset}}$$

3.2. Struktur Kepemilikan

KI diukur menggunakan rasio kepemilikan ekuitas dari pemegang saham institusional (Khamis et al., 2015). Rumus struktur KI :

$$KI = \frac{\text{Saham kepemilikan institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

KM diukur menggunakan rasio kepemilikan ekuitas dari pemegang saham pihak manajer (Khamis et al., 2015). Rumus struktur KM :

$$KM = \frac{\text{Saham kepemilikan manajer}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

KP diukur menggunakan rasio dari kepemilikan saham yang dimiliki publik. Rumus struktur KP :

$$KP = \frac{\text{Saham kepemilikan publik}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.3. Tax Avoidance

TA merupakan teknik penghindaran pajak sebagai proses transfer nilai dari negara ke pemegang saham untuk memajukan kepentingan pemegang saham. Kegiatan perencanaan pajak membawa penghindaran pajak tidak hanya tentang biaya implementasi langsung, seperti biaya transaksi dan tenaga kerja/waktu, tetapi juga biaya tidak langsung termasuk: potensi pendapatan yang dilaporkan lebih rendah, hukuman dan reputasi serta biaya politik, dan kemungkinan peningkatan pajak di masa mendatang (Hanlon & Slemrod, 2009; Hasan et al., 2014). Seperti dalam literatur sebelumnya, penelitian ini mengukur penghindaran pajak menggunakan tarif pajak efektif (ETR) dengan fokus pada prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) (Cen et al., 2017; S. Chen et al., 2010; Dyreng et al., 2008; Lennox

et al., 2013; Nguyen, 2021). ETR yang disesuaikan dengan industri memungkinkan peneliti mengidentifikasi aktivitas penghindaran pajak yang menyimpang dari norma industri sebagai strategi perencanaan pajak yang agresif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Pengujiannya menggunakan nilai VIF dan toleransi dengan kriteria pengujianya, variabel independen tidak mengandung multikolinearitas jika toleransinya $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2016). Berdasarkan hasil analisis uji multikolinearitas pada variabel independen dalam model regresi 1 dan 2 tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai VIF < 10 .

Uji normalitas ini dengan program Eviews ini dengan melihat nilai probabilitas Jarque Bera. Residual dikatakan memiliki distribusi normal apabila probabilitasnya tidak menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05. Hasil pada model regresi 1 dan model regresi 2 memberi kesimpulan bahwa residual memiliki distribusi yang tidak normal karena nilai probabilitas kurang dari 0,05. Prosedur koreksi dilakukan dengan menggunakan koefisien estimasi rebust atau estimasi Hubber White. Dengan prosedur ini, Eviews dapat mengoreksi hasil perhitungan standard error sehingga dapat digunakan untuk pengujian statistik.

Uji White sebagai pengujian heteroskedastisitas digunakan pada penelitian ini. Data bebas dari heteroskedastisitas apabila Prob. Chi Square tidak bernilai signifikan. Hasil tidak menunjukkan masalah heteroskedastisitas karena Prob. Chi Square tidak menunjukkan angka signifikan pada model regresi 1 dan 2 yaitu 0,7407 dan 0,8527.

Penelitian ini mempergunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test sebagai ujia autokorelasi. Data lolos uji autokorelasi apabila Prob. Chi Square $> 0,05$. Hasil menunjukkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi 1 dan model regresi 2 karena nilai Prob. Chi Square 0,7816 dan 0,8425.

Tabel 1. Uji Asumsi Klasik

Variabel	Uji Multikolinearitas (VIF Test)	
	Model Regresi 1	Model Regresi 2
	VIF	VIF
Kepemilikan Institusional	5,2800	6,9773
Kepemilikan Manajerial	2,2298	7,6537
Kepemilikan Publik	5,1936	2,1958
Tax Avoidance	-	1,3058
Uji Normalitas (Jarque Bera)		
Jarque Bera	108,0829	54,5028
Probability	0,0000	0,0000
Uji Heteroskedastisitas (White Test)		
Prob. F	0,8150	0,9364
Prob. Chi Square	0,7407	0,8527
Uji Autokorelasi (LM Test)		
Prob. F	0,8225	0,8787
Prob. Chi Square	0,7816	0,8425

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

4.2. Uji Kelayakan Model

Model yang menunjukkan kelayakan dapat diuji dengan melihat gambaran Adjusted R-Square dan uji f atau nilai probabilitas statistik secara bersama-sama. Model regresi 1 dan 2 masing-masing menunjukkan nilai Adjusted R Square 0,1385 dan 0,1136 artinya model regresi 1 variabel *tax avoidance* dijelaskan dari variabel-variabel bebas penelitian ini (kepemilikan manajerial, institusional, publik) sebesar 13,85 %. Model regresi 2 variabel *tunneling* dijelaskan dari variabel-variabel bebas riset ini (kepemilikan manajerial, institusional, publik dan *tax avoidance*) yaitu 11,36%. Sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nilai signifikansi F pada model regresi 1 dan 2 masing-masing 0,0883 dan 0,1508 artinya variabel-variabel bebas memberikan pengaruh simultan terhadap variabel terikat.

Tabel 2. Uji Kelayakan Model

	Model Regresi 1	Model Regresi 2
F Hitung	2,4470	1,8653
Sig.	0,0883	0,1508
Adjusted R-Square	0,1385	0,1136

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

4.3. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tunneling* melalui *tax avoidance* tahun 2021 sampai 2022 diperoleh hasil dan pembahasan sebagai berikut :

Tabel 3. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis Model Regresi 1					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Hasil
Constant	-0,0279	0,1850	-0,1511	0,8811	-
Kepemilikan Institusional	0,2650	0,2515	1,0538	0,3025	H1a Tidak Terdukung
Kepemilikan Manajerial	0,7338	0,3285	2,2335	0,0351	H1b Tidak Terdukung
Kepemilikan Publik	-0,3505	0,1697	-2,0649	0,0488	H1c Terdukung
Adjusted R-Square = 0,1385 Sig. F = 0,0883					
Dependent Variabel : Tax Avoidance					
Uji Hipotesis Model Regresi 2					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Hasil
Constant	-0,0075	0,0077	-0,9778	0,3383	-
Kepemilikan Institusional	0,0058	0,0116	0,5015	0,6207	H2a Tidak Terdukung
Kepemilikan Manajerial	-0,0363	0,0125	-2,8879	0,0083	H2b Terdukung
Kepemilikan Publik	-0,0315	0,0075	-2,4483	0,0224	H2c Terdukung
Tax Avoidance	0,0075	0,0066	1,1289	0,0279	H3 Terdukung
Adjusted R-Square = 0,1136 Sig. F = 0,1508					
Dependent Variabel : Tunneling					

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Hipotesis 1a (H1a) menguji pengaruh KI terhadap TA. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi dengan nilai koefisien positif (0,2650) dan t hitung $0,3025 > 0,05$ artinya KI menunjukkan pengaruh positif tidak signifikan terhadap TA. Hasil riset menunjukkan tindakan para shareholder yang lebih besar dari pemilik institusional akan membantu meningkatkan efek TA demi kepentingan shareholder yang mana para shareholder lebih besar dari KI akan mengadakan intervensi pada manajer yang bertujuan untuk menurunkan jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan individu. Hal ini dikarenakan dalam kondisi sekarang terdapat pemegang saham institusional jangka pendek (short term shareholder) yang bisa mempengaruhi pihak manajemen untuk menjadi lebih kuat dalam melakukan upaya untuk menghindari pajak karena adanya keinginan untuk mensejahterakan diri sendiri tanpa merusak nama baik entitas.

Hipotesis 1b (H1b) menguji pengaruh KM terhadap TA. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi dengan nilai koefisien positif (0,7338) dan t hitung $0,0351 < 0,05$ artinya KM menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap TA. KM meningkat tidak selalu mampu meningkatkan keberhasilan para pemegang saham secara menyeluruh. Bahkan disebutkan jika manajer di sebuah perusahaan meningkatkan kepemilikannya maka hal yang dapat terjadi adalah para manajer mendominasi jajaran direksi sehingga dapat dengan mudah mengambil keputusan, dengan demikian manajer mengisolasi kepentingan pihak lain dalam pengendalian internal dan eksternal perusahaan. Para manajer mempunyai hak dominan yang cukup tinggi sehingga kemungkinan untuk terlibat dalam TA tinggi.

Hipotesis 1c (H1c) menguji pengaruh KP terhadap TA. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi dengan nilai koefisien negatif (-0,3505) dan t hitung $0,0279 < 0,05$ artinya KP menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan terhadap TA. KP cenderung agresif dalam strategi perusahaan dan masyarakat mempunyai ciri-ciri umum yakni berharap agar perusahaan dapat berkontribusi dalam pembayaran pajak yang berguna sebagai pembangunan negara. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh publik dalam entitas, TA perusahaan akan semakin menurun. KP yang tinggi berarti proporsi pihak manajerial akan sempit karena pengawasan yang dijalankan oleh masyarakat terhadap pihak manajemen tinggi dengan begitu kesalahan yang mungkin akan dijalankan dari manajemen semakin kecil.

Hipotesis 2a (H2a) menguji pengaruh KI terhadap *tunneling*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi dengan nilai koefisien positif (0,0058) dan t hitung $0,6207 > 0,05$ artinya KI menunjukkan pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap *tunneling*. Hasil penelitian menunjukkan pemegang saham institusional cenderung mentransfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk mempertahankan operasi perusahaan induk bahkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kepemilikan institusional terhadap risiko pengambilalihan.

Hipotesis 2b (H2b) menguji pengaruh KM terhadap *tunneling*. Hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan tingkat signifikansi dengan nilai koefisien negatif (-0,0363) dan t hitung $0,0083 < 0,05$ artinya kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan terhadap *tunneling*. KM mendorong para manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan artinya tidak akan terjadi tindakan *tunneling*, karena manajer menanggung proporsi efek kekayaan sebagai pemegang saham. Hal ini dikarenakan perilaku *tunneling* merupakan opportunistic behavior yang merupakan perilaku yang negatif, jadi manajer tidak mungkin melakukan sesuatu yang mengakibatkan dampak negatif untuk jangka panjang, karena manajer sebagai pemegang saham apabila melakukan *tunneling* meskipun menguntungkan pada jangka pendek perilaku tersebut akan merugikan pada jangka panjang.

Hipotesis 2c (H2c) menguji pengaruh KP terhadap *tunneling*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi dengan nilai koefisien negatif (-0,0315) dan t hitung $0,0224$

$< 0,05$ artinya KP menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan terhadap *tunneling*. KP memiliki efek negatif pada risiko pengambilalihan karena tingkat pemantauan yang tinggi dari investor publik dapat menurunkan kesempatan bagi transaksi pengambilalihan.

Hipotesis 3 (H3) menguji pengaruh TA terhadap *tunneling*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi dengan nilai koefisien positif (0,0075) dan t hitung 0,0279 $< 0,05$ artinya TA menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap *tunneling*. Hasil penelitian menunjukkan struktur kepemilikan yang tidak kuat lebih sensitif terhadap masalah keagenan seperti *tunneling* yang dapat diperkuat melalui penghindaran pajak sehingga diperlukan kebijakan yang jelas oleh pihak manajemen dalam proses penghindaran pajak.

4.4 Uji Sobel

Uji Sobel penelitian ini dilakukan melalui perhitungan aplikasi online uji sobel pada www.danielsoper.com. Hasil penganalisan uji sobel dapat diringkas pada table 4 :

Tabel 4. Uji Sobel

Variabel Independen	A	B	SEA	SEB	Sobel Test Statistic	Prob. Two Tailed	Hasil
Kepemilikan Institusional	0,2650	0,0075	0,2515	0,0066	0,7726	0,4397	H4a Tidak Terdukung
Kepemilikan Manajerial	0,7338	0,0075	0,3285	0,0066	1,0128	0,3111	H4b Tidak Terdukung
Kepemilikan Publik	-0,3505	0,0075	0,1697	0,0066	-0,9956	0,3194	H4c Tidak Terdukung

Variabel Intervening : Tax Avoidance

Variabel Dependen : Tunneling

Hipotesis 4a, 4b dan 4c (H4a, H4b dan H4c) menunjukkan bahwa TA tidak dapat memediasi pengaruh KI, KM dan KP terhadap *tunneling*. Sobel test statistic diperoleh hasil sebesar 0,7726; 1,0128; dan -0,995, nilai tersebut kurang dari nilai t tabel yaitu 1,968. Hasil penelitian menunjukkan KI dan KM menjadi salah satu variabel yang bisa digunakan untuk mengurangi agency conflict ternyata dalam hasil riset tidak menunjukkan hal tersebut. Pemegang saham yang mayoritas dimiliki oleh institusi dapat dengan mudah mengambil alih keuntungan perusahaan dan merugikan pemegang saham lainnya. Justru manajer memanfaatkan celah yang dimiliki untuk mengambil alih keuntungan perusahaan melalui TA sebagai sarana dalam memfasilitasi *tunneling*. KP memiliki efek negatif pada risiko pengambilalihan karena tingkat pemantauan yang tinggi dari investor publik dapat menurunkan kesempatan bagi transaksi pengambilalihan atau *tunneling* melalui TA.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (KI) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (TA) dan *tunneling*. Kepemilikan manajerial (KM) berpengaruh positif signifikan terhadap TA namun berpengaruh negatif signifikan terhadap *tunneling*. Sedangkan kepemilikan publik (KP) berpengaruh negatif signifikan terhadap TA dan *tunneling*, selanjutnya TA berpengaruh signifikan terhadap *tunneling*. Hasil sobel test juga menunjukkan bahwa TA tidak dapat menjadi variabel intervening pada struktur kepemilikan terhadap *tunneling*.

Berdasarkan pengujian koefisien determinasi diketahui bahwa masih terdapat faktor-

faktor lain diluar variabel penelitian yang mempengaruhi *tunneling*. Sehingga memungkinkan untuk penambahan variabel lain yang berpengaruh terhadap *tunneling*. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan model riset dengan mencari variable lain seperti kinerja keuangan perusahaan (Current Ratio, Quick Ratio, ROA, ROE, Fixed Asset Turnover, Total Asset Turnover, Debt to Asset, Debt to Equity) yang dapat memberi gambaran lebih baik mengenai dampak dari struktur kepemilikan dan tax avoidacne, sehingga riset dapat berkembang.

REFERENCE

- Aharony, J., Wang, J., & Yuan, H. (2010). Tunneling as an Incentive for Earnings Management During The IPO Process in China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29(1), 1–26. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.003>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: Empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8(2), 95–189.
- Athira, A., & Lukose, P. J. J. (2023). Do common institutional owners' activisms deter tax avoidance? Evidence from an emerging economy. *Pacific Basin Finance Journal*, 80. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.102090>
- Baker, P. L., Lyu, P., & Perotti, P. (2023). Does tax avoidance impair accounting comparability? *Journal of Accounting Literature*. <https://doi.org/10.1108/JAL-07-2022-0078>
- Cen, L., Maydew, E. L., Zhang, L., & Zuo, L. (2017). Customer–supplier relationships and corporate tax avoidance. *Journal of Financial Economics*, 123(2), 377–394.
- Chen, C., Wan, W. Y., & Zhang, W. (2018). Board Independence as a Panacea to Tunneling? An Empirical Study of Related-Party Transactions in Hong Kong and Singapore. In *Journal of Empirical Legal Studies* (Vol. 15, Issue 4). <https://doi.org/10.1111/jels.12197>
- Chen, J., Blenman, L., & Chen, D.-H. (2008). Does Institutional Ownership Create Values? the New Zealand Case. *Quarterly Journal of Finance and Accounting*, 47(4), 109.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms ? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Chen, S. X. (2017). The effect of a fiscal squeeze on tax enforcement: Evidence from a natural experiment in China. *Journal of Public Economics*, 147, 62–76. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.01.001>
- Cheung, Y. L., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2006). Tunneling, Propping, and Expropriation: Evidence from Connected Party Transactions in Hong Kong. *Journal of Financial Economics*, 82(2), 343–386. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.08.012>
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P. H., & Lang, L. H. P. (2002). Disentangling The Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings. *Journal of Finance*, 57(6), 2741–2771. <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00511>
- Demerjian, P., Lev, B., & McVay, S. (2012). Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests. *Management Science*, 58(7), 1229–1248. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1110.1487>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Review of Economics and Statistics*, 91(August), 537–546.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>

- Fakhriyyah, D. D., Purnomosidhi, B., & Subekti, I. (2017). Pengaruh Tata Kelola terhadap Praktik Ekspropriasi dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, VII(3), 465–483.
- Fan, J. P. H., Wong, T. J., & Zhang, T. (2007). Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and Post-IPO Performance of China's Newly Partially Privatized Firms. *Journal of Financial Economics*, 84(2), 330–357. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.03.008>
- Fiandri, K. A., & Muid, D. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesiatahun 2011 – 2014. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 31–43.
- Gao, L., & Kling, G. (2008). Corporate Governance and Tunneling: Empirical Evidence from China. *Pacific Basin Finance Journal*, 16(5), 591–605. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.09.001>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, M. S. (2003). Is Corporate Governance Ineffective in Emerging Markets? *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(1), 231. <https://doi.org/10.2307/4126771>
- Guing, A., & Farahmita, A. (2011). Manajemen Laba dan Tunneling Melalui Transaksi Pihak Istimewa Di Sekitar Penawaran Saham Perdana. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, 21–22.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141.
- Hasan, I., Hoi, C. K. S., Wu, Q., & Zhang, H. (2014). Beauty is in the eye of the beholder: the effect of corporate tax avoidance on the cost of bank loans". *Journal of Financial Economics*, 113(1), 109–130.
- Hassan, N., Masum, M. H., & Sarkar, J. B. (2022). OWNERSHIP STRUCTURE AND CORPORATE TAX AVOIDANCE: EVIDENCE FROM THE LISTED COMPANIES OF BANGLADESH. *Polish Journal of Management Studies*, 25(1), 147–161. <https://doi.org/10.17512/pjms.2022.25.1.09>
- Huang, W. (2019). Ownership, tax and intercorporate loans in China. *International Journal of Accounting and Information Management*, 27(1), 111–129. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-09-2017-0114>
- Huyghebaert, N., & Wang, L. (2012). Expropriation of Minority Investors in Chinese Listed Firms: The Role of Internal and External Corporate Governance Mechanisms. *Corporate Governance: An International Review*, 20(3), 308–332. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2012.00909.x>
- Imam, Muh. A., Pagalung, G., & Pontoh, G. T. (2016). The Effect of Share Ownership Structure on the Risk of Expropriation in Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Management and Business*, 15(2), 41–46. <https://doi.org/10.24123/jmb.v15i2.69>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jiang, G., Lee, C. M. C., & Yue, H. (2010). Tunneling Through Intercorporate Loans: The China Experience. *Journal of Financial Economics*, 98(1), 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.j>

jfineco.2010.05.002

- Johnson, S., Porta, L., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Tunneling. *American Economic Review*, 90(2), 22–27.
- Juliarto, A., Tower, G., Zahn, M. Van, & Rusmin. (2013). Managerial Ownership Influencing Tunnelling Behaviour. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal Article*, 7(2), 25–46. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v7i2.3>
- Khamis, R., Hamdan, A. M., & Elali, W. (2015). The relationship between Ownership Structure Dimensions and Corporate Performance: Evidence from Bahrain. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 9(4), 38–56. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v9i4.4>
- Kholbadalov, U. (2012). The Relationship of Corporate Tax Avoidance, Cost of Debt and Institutional Ownership : Evidence from Malaysia. *Atlantic Review of Economics*, 2.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2012). Institutional Shareholders' Investment Horizons and Tax Avoidance. *Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 111–134.
- Kim, W., Sung, T., & Wei, S. (2011). Does Corporate Governance Risk at Home Affect Investment Choices Abroad ? *Journal of International Economics*, 85(1), 25–41. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2011.03.009>
- Koester, A., Shevlin, T., & Wangerin, D. (2017). The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance. *Management Science*, 63(10), 3285–3310. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2510>
- Kovermann, J. H. (2018). Tax avoidance, tax risk and the cost of debt in a bank-dominated economy. *Managerial Auditing Journal*, 33(8/9), 683–699. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2017-1734>
- Lam, K. C. K., Sami, H., & Zhou, H. (2012). The Role of Cross-listing, Foreign Ownership and State Ownership in Dividend Policy in an Emerging Market The role of Cross-listing, Foreign Ownership and State Ownership in Dividend Policy in an Emerging Market. *China Journal of Accounting Research*, 5(3), 199–216. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.06.001>
- Lee, K., & Yoon, S. (2020). Managerial Ability and Tax Planning: Trade-Off between Tax and Nontax Costs. *Sustainability*, 12(1), 370. <https://doi.org/10.3390/su12010370>
- Lennox, C., Lisowsky, P., & Pittman, J. (2013). Tax aggressiveness and accounting fraud. *Journal of Accounting Research*, 51(4), 739–778.
- Lin, X., Liu, M., So, S., & Yuen, D. (2019). Corporate social responsibility, firm performance and tax risk. *Managerial Auditing Journal*, 34(9), 1101–1130. <https://doi.org/10.1108/MAJ-04-2018-1868>
- Liu, Q., & Lu, Z. (Joe). (2007). Corporate Governance and Earnings Management in the Chinese Listed Companies: A Tunneling Perspective. *Journal of Corporate Finance*, 13(5), 881–906. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2007.07.003>
- Liu, Q., Luo, T., & Tian, G. G. (2015). Family Control and Corporate Cash Holdings: Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 31, 220–245. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.02.007>
- Liu, Y., Miletkov, M. K., Wei, Z., & Yang, T. (2014). Board Independence and Firm Performance in China. *Journal of Corporate Finance*, 30, 223–244. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.12.004>
- McGuire, S., Wang, D., & Wilson, R. (2011). Dual Class Ownership and Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 89(4), 1487–1516.
- Mutamimah. (2009). Tunneling atau Value Added dalam Strategi. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 2, 161–182.

- Nguyen, J. H. (2021). Tax avoidance and financial statement readability. *European Accounting Review*, 30(5), 1043–1066.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santiago-Castro, M., & Brown, C. J. B. (2011). Corporate Governance, Expropriation of Minority Shareholders Rights, and Performance of Latin American Enterprises. *Annals of Finance*, 7(4), 429–447. <https://doi.org/10.1007/s10436-009-0132-z>
- Saragih, A. H., & Ali, S. (2023). The impact of managerial ability on corporate tax risk and long-run tax avoidance: empirical evidence from a developing country. *Corporate Governance (Bingley)*. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2022-0346>
- Sari, R. C., & Sugiharto. (2018). Tunneling dan Corporate Governance. In *Oxford Encyclopedia of Business and Management*, 153(153), 84–97.
- Selcuk, E. A., & Sene, P. (2018). Corporate Governance and Tunneling: Empirical Evidence from Turkey. *Economics Bulletin*, 38(1), 349–361.
- Shan, Y. G. (2013). Can Internal Governance Mechanisms Prevent Asset Appropriation? Examination of Type I Tunneling in China. *Corporate Governance: An International Review*, 21(3), 225–241. <https://doi.org/10.1111/corg.12022>
- Tang, T. Y. H. (2016). Privatization, Tunneling, and Tax Avoidance in Chinese SOEs. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 274–294. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2014-0091>
- Utama, C. A., Utama, S., & Amarullah, F. (2017). Corporate governance and ownership structure: Indonesia evidence. *Corporate Governance (Bingley)*, 17(2), 165–191. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2015-0171>
- Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 15–26. <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.15-26>
- Xie, Y., Zheng, L., & Amy Lau, H. L. (2012). Reporting incentives for accounting conservatism, evidence from asset and equity tunnelling. *Pacific Accounting Review*, 24(2), 138–160. <https://doi.org/10.1108/01140581211258452>
- Ye, Y., Huang, L., & Li, M. (2015). Negative media coverage, law environment and tunneling of controlling shareholder: Evidence from Chinese listed companies. *China Finance Review International*, 5(1), 3–18. <https://doi.org/10.1108/CFRI-12-2013-0135>